

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN "SIJORI" DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBUDAYAAN<sup>1</sup>**

---

Sutamat Arybowo<sup>2</sup>

### ***Abstract***

*In the New Order era, President Soeharto, Prime Minister Mahathir Muhammad, and Prime Minister of Lee Kuan Yew developed a cooperation among three nearby states, which called "growth triangle" Singapura - Johor - Riau (Sijori). The approach used at that moment was "comparative advantage". As a consequence of this approach, its orientation tends to be more quantitative rather than qualitative. Caring less for the qualitative issue has made the approach 'ignore' the problems of culture. Therefore, policies executed following the paradigm of "growth triangle" Sijori were merely seen from the perspective of economic and politics.*

*This article tries to reflect and converse the cooperation of "growth triangle" in Kepulauan Riau from the perspective of culture. Particularly in answering the question on how the policies of culture in this area at past, present, and the future are.*

*Keyword: Politics of culture, development policy, Sijori, Malay's world.*

### **Pengantar**

Seorang peneliti Amerika Serikat, Philip Yampolsky mengisahkan pengalamannya ketika pertama kali mengunjungi daerah Kepulauan Riau. Dari seberang lautan peneliti itu mendengar sayup-sayup senandung Melayu, diperkirakan lagu "Sri Mersing", yaitu lagu Melayu klasik kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau pada zaman dahulu. Kadang-kadang hanya terdengar senandungnya saja yang melankolis tanpa syair, sehingga peneliti itu heran, ada apa dengan daerah ini. Lalu pemandunya dengan cepat menjelaskan, inilah suatu bukti bahwa daerah Kepulauan Riau

---

<sup>1</sup>Tulisan ini sebagian pernah disampaikan pada Kongres Kebudayaan Indonesia 2008, di Bogor, 9-12 Desember 2008.

<sup>2</sup>Peneliti bidang kebudayaan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dapat dihubungi di PMB-LIPI Gedung Widya Graha Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan. Telp/Fax: (021) 5701232.

memiliki banyak hal yang menakjubkan. Kepulauan Riau diibaratkan sebagai daerah yang menyebar luas seperti “segantang lada”. Daerah ini membentang dari Laut Cina Selatan hingga Selat Bangka, terletak di posisi silang selat Melaka, dapat ditempuh lewat jalur laut dan udara dari penjuru mana saja. Posisinya dapat menghubungkan Lautan Atlantik dengan Lautan Pasifik, juga dapat menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Kepulauan Riau memiliki letak yang sangat strategis di jantung Selat Melaka. Secara geografis, merupakan selat teramai di dunia karena dilewati dan disinggahi oleh kapal-kapal besar yang mengadakan pelayaran dari Atlantik ke Pasifik. Kepulauan Riau dekat dengan Singapura yang merupakan pusat perdagangan internasional yang memiliki jalur langsung transportasi udara ke penjuru dunia. Setelah *Traktat London* tahun 1824 baik Singapura maupun Kepulauan Riau, sebenarnya saling berlomba untuk mendirikan Pelabuhan Laut sebagai tempat transit perdagangan internasional. Singapura dibeli oleh Inggris dari Sultan Husein seharga 82 (delapan puluh dua) ringgit pada tahun 1857. Kemudian dibangun oleh Raffles dan menjadi pelabuhan besar berkembang pesat pada tahun 1875.

Demikian pula Residen Netscher mewakili Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu berusaha keras membangun Pelabuhan Bintan, namun tidak sehebat Raffles, sehingga Pelabuhan Bintan kalah bersaing dengan Singapura. Pada saat itu perekonomian dunia sedang membaik, hasil perkebunan karet, gambir dan kopra sedang meningkat (Bujang, 1975). Sekitar tahun 1870 harga kopra di pasaran dunia naik, sehingga pendapatan melalui cukai diperkirakan dapat membiayai pembangunan fisik pelabuhan. Kekalahan bersaing membangun perekonomian dengan Singapura bukan menjadi penghalang untuk maju di bidang lain. Sebagian penduduk di wilayah Kesultanan Melayu telah mengembangkan sektor lain, seperti sastra dan budaya. Pada masa perekonomian membaik, Singapura mampu membangun pelabuhan dagang terbesar, sedangkan Kepulauan Riau telah mampu mengembangkan identitas dirinya dengan kesusasteraan dan bahasa Melayu.

Pada saat harga kopra membaik itu pula kegiatan-kegiatan pemanggungan di Kepulauan Riau ikut semarak. Beberapa seni pertunjukan ikut hidup, antara lain Panggung Bangsawan yang datang dari Parsi kemudian menyebar ke Semenanjung Melayu hingga ke Kepulauan Riau. Begitu pula teater Mak Yong yang tadinya berasal dari Naratiwat Patani, kemudian menyebar seiring dengan perkembangan kebudayaan Melayu. Begitu pula teater Mendu di daerah Kepulauan Tujuh (Natuna), mendapat tempat di hati masyarakat pendukungnya seiring dengan kebutuhan media

ekspresi bagi kegiatan ritual masyarakat pulau-pulau. Tidak ketinggalan pertunjukan musik Melayu dan Joget Dangkung berkembang untuk menghibur para nelayan atau petani kebun bersamaan dengan masa panen atau menyambut pendaratan para nelayan. Singkatnya, kebutuhan terhadap kesenian bagi masyarakat Bandar adalah bersamaan dengan bangkitnya pertumbuhan sosial ekonomi (Kadir, 1988). Atau sebaliknya, adanya perubahan sosial secara besar-besaran bagi masyarakat bandar membawa dampak besar bagi perkembangan kesenian di daerah Kepulauan Riau.

Seiring dengan perubahan zaman, walaupun sejarah tidak terulang, namun masa kejayaan Kerajaan Melayu telah mengilhami para penguasa negeri yang penduduknya masih serumpun. Kerajaan Melayu dipisah oleh kolonialisme Barat dan secara riil pada saat ini berada di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tampaknya pada zaman kejayaan ASEAN, para pemimpin di tiga negara tersebut telah sepakat untuk saling meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan ketiga pihak dengan menggunakan kriteria “keunggulan komparatif”. Singapura mempunyai modal dan teknologi; Malaysia mempunyai pasar; dan Indonesia memiliki lahan dan tenaga kerja. Oleh karena itu mereka sepakat untuk saling menyampaikan keunggulannya dengan mengadakan kerjasama yang disebut *Growth Triangle* Sijori (Singapura – Johor – Riau).

Sebenarnya hal ini bukan kerjasama tiga negara mengingat Johor adalah negeri bagian dari Malaysia, dan Riau merupakan provinsi di bawah Republik Indonesia. Namun apapun istilah yang dipakai, yang penting esensinya adalah ingin memakmurkan kawasan sekitar Selat Melaka, dalam rangka menyambut pertumbuhan ekonomi ASEAN.

Paling tidak setelah dilaksanakan kerjasama Sijori tersebut, secara sosial, ekonomi, dan politik ketiga belah pihak merasa saling diuntungkan. Secara makro, konsep tersebut telah berhasil membawa sistem perekonomian Kepulauan Riau ke dalam sistem kapitalisme global, walaupun masih ada kekurangannya. Dampak yang cukup menonjol dari penerapan kerjasama Sijori tersebut adalah pesatnya perkembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri dan pergudangan, juga pesatnya kawasan Bintan Utara sebagai kawasan industri dan pariwisata. Di Bintan Utara tepatnya di daerah Sebong Lagoi telah dibangun kawasan Pariwisata Terpadu, dan hasilnya cukup spektakuler telah dapat mendatangkan wisatawan mancanegara melalui Bandar Udara Changi Singapura. Sementara pengelola kawasan tersebut adalah pengusaha dari Singapura dengan sistem kontrak selama tiga puluh tahun, dan kalau memungkinkan dapat diperpanjang lagi. Namun dalam realisasinya, sekarang ini sebagian besar kawasan wisata Bintan Utara tersebut telah disewa oleh Singapura

selama 80 tahun dan hingga kini rakyatnya belum mengetahui (S.M. Nasution 2001).

Bersamaan dengan pengembangan kawasan tersebut telah hadir beberapa grup kesenian baik dari Melayu maupun dari luar Melayu. Barangkali dapat dikatakan bahwa sejarah telah terulang, di mana perekonomian tumbuh secara baik, maka di situ pula kesenian tumbuh menyebar. Tidak ubahnya di kawasan wisata Lagoi, di situ telah berkembang grup-grup kesenian di desa wisata Teluk Pengudang. Setelah dibiarkan kompetisi secara terbuka ternyata grup kesenian yang tetap berjalan hidup adalah grup kesenian di luar Kepulauan Riau seperti Reog Ponorogo, Barongsai, Tari Bali, dan Jaipong dari Jawa Barat.

### **Penduduk di Daerah Kepulauan Riau**

Daerah ini menjadi konsentrasi para migran yang penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang etnik. Penduduk pendatang yang paling lama di daerah ini adalah orang Cina. Mereka datang ke daerah ini diperkirakan pada zaman Sriwijaya, kemudian menyebar luas terhitung tahun 1457 sejak hubungan perniagaan antara Cina dengan Asia Tenggara meningkat. Rangkaian episode ini digambarkan dalam *Sejarah Melayu* yang menjelaskan pengaruh penting antara Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Adrian B. Lopian (1994) menggambarkan Selat Melaka sebagai “hatinya lautan”, yang dapat mengalirkan semua aktivitas dari Atlantik ke kawasan Pasifik. Pada abad ke – 15 orang Cina dari negeri Tiongkok berdatangan melalui Laut Cina Selatan menuju daerah terbuka yang di kenal dengan *Riau Archipelago*. Mereka beranak-pinak sampai sekarang membar menjadi satu bersama orang setempat. Singkatnya pada masa itu hubungan perniagaan dari negeri Tiongkok bertambah maju pesat seiring perkembangan kawasan Selat Melaka.

Begitu pula orang dari pulau Jawa berdatangan silih berganti dibawa oleh Belanda sebagai kuli kontrak, untuk membuka perkebunan dan pertambangan. Sejak terjadi konsesi ekonomi antara Sultan Lingga dengan Belanda pada akhir abad ke-19, banyak orang Jawa yang datang ke daerah ini untuk bekerja di pertambangan timah dan bouksit. Tetapi ada pula yang transit saja berhubung akan pergi ke Singapura atau Johor untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan karet. Sebagian ada pula orang Jawa yang hendak pergi dagang ke Timur Tengah atau naik haji ke Arab Saudi, yang kebetulan kehabisan perbekalan, kemudian singgah dulu di daerah ini. Sebaliknya orang Timur Tengah yang hendak pergi dagang ke tanah Jawa, mereka sering singgah dulu ke Melaka atau Tanjung Balai Karimun, dan akhirnya ada yang menetap di daerah Kepulauan Riau.

Saat ini daerah Kepulauan Riau tetap menjadi daerah terbuka baik sebagai daerah transit atau daerah tujuan untuk berdomisili. Banyak orang dari berbagai penjuru telah menjadikan daerah ini sebagai persinggahan sanak famili berdasarkan etnik seperti disebut di atas. Kini orang Jawa yang hendak pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), biasanya naik kapal laut menuju ke Pelabuhan Kijang di Pulau Bintan atau melalui Pelabuhan Batu Ampar di Pulau Batam, kemudian mereka singgah dulu beberapa hari di Tanjungpinang, baru berangkat ke lokasi tujuan di Malaysia. Orang Jawa Timur, orang Lombok, orang Flores dan lainnya dapat transit di daerah ini. Tanpa disadari banyak penduduk Indonesia yang hendak pergi ke luar negeri dengan menggunakan kapal laut sebagian besar melalui jalur Kepulauan Riau. Jadi Kepulauan Riau adalah daerah transit untuk para migran yang paling strategis di Indonesia.

Kenyataan di lapangan saat ini sulit untuk membedakan penduduk pendatang atau orang baru dengan penduduk yang telah lama tinggal. Hal ini disebabkan sejak dibukanya Batam dan Bintan Utara sebagai kawasan industri, mobilitas penduduk begitu cepat. Pada zaman kolonial dan pascakemerdekaan RI trayek kapal laut dari pulau Jawa ke daerah ini hanya sekali dalam tiga bulan, dengan menempuh waktu perjalanan 3-4 hari lebih. Kemudian dengan kemajuan teknologi kapal laut, pada saat ini semua trayek cukup lancar, rata-rata seminggu satu kali dengan waktu perjalanan hanya ditempuh 26 jam. Meskipun demikian tingkat perkembangan migrasi menurun. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2000 yang dilakukan oleh BPS, untuk daerah Kabupaten Kepulauan Riau (sebelum menjadi Kabupaten Bintan) disebut 30,79%. Pada hal pada zaman kolonial tahun 1910 penduduk Cina yang berdomisili di kota Tanjungpinang saja sudah mencapai 58,86%. Barangkali penduduk yang datangnya sebelum masa kemerdekaan sudah dianggap sebagai penduduk lama dan dianggap sebagai bukan status migran.

Menurutnya penduduk migran seumur hidup tersebut bisa juga atas pertimbangan kesadaran kedaerahan yang selama ini dibangun berdasarkan etnisitas. Hal ini mengandung dilema, baik penduduk Riau Daratan maupun penduduk Riau Kepulauan, karena masing-masing memiliki jumlah yang tidak objektif. Penduduk Riau Daratan dari lima kabupaten, yang empat kabupaten secara objektif adalah etnik Minangkabau, dan satu kabupaten (Bengkalis) adalah etnik Cina. Sedangkan penduduk Kepulauan Riau hampir merata adalah etnik Cina, Jawa, dan Bugis. Jadi Pemerintah Daerah mempertahankan pendekatan etnisitas untuk menjadikan karakteristik penduduk Melayu, sehingga BPS telah memberikan warna penduduk Provinsi Riau (sebelum dimekarkan) adalah etnik Melayu. Bisa jadi jumlah migran seumur hidup 30,79%

sebagaimana disebutkan di atas adalah berdasarkan pertimbangan subjektif atau pertimbangan politik, supaya dapat dikatakan bahwa penduduk daerah Riau adalah etnik Melayu.

Di samping itu, daerah Kepulauan Riau terletak di kawasan yang secara ekonomi sangat menguntungkan, yaitu dekat Selat Melaka yang merupakan pintu gerbang perdagangan internasional dengan pusatnya di Singapura. Alamnya sangat potensial karena memiliki tambang timah, bouksit, pasir granit. Sebagai tempat transit angkutan minyak bumi ke seluruh dunia, juga memiliki hasil perkebunan seperti karet, kopra, lada, gambir, dan sudah barang tentu hasil laut berbagai jenis ikan juga terdapat di daerah ini. Daerah yang potensial itu, kini penduduknya secara ekonomi tertinggal, justru bertepatan dengan kawasan ini sedang dikembangkan menjadi *Growth Triangle* Sijori. Pada zaman Reformasi, secara administratif daerah ini sudah dimekarkan menjadi dua kota dan empat kabupaten. Tetapi sehubungan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup lama, pembangunan di daerah ini menghadapi kendala. Oleh karena itu, secara makro pemerintah ingin membuat Kepulauan Riau terkooperasikan dalam sistem perekonomian internasional, tetapi dalam prakteknya pemerintah belum bisa mewujudkannya.

### **Dampak Industrialisasi Terhadap Kebudayaan**

Kerjasama Sijori (Singapura, Johor, Riau) dibangun dengan tujuan utama, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masing-masing negara yang terdekat, di samping juga untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi regional ASEAN. Dasarnya adalah apa yang populer disebut keunggulan komparatif (*comparative advantage*), artinya bahwa masing-masing negara mempunyai keunggulan yang tidak sama. Singapura dengan alat-alat pendukung yang memadai, modal, tenaga ahli dan teknologi; Johor memiliki pasar dan tenaga setengah ahli; sedangkan Kepulauan Riau (Batam-Bintan) dengan tenaga kerja dan tanah yang sangat murah. Kerjasama dengan perbedaan alat-alat pendukung yang dipunyai oleh masing-masing negara tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan industri yang efisien dan dapat memberikan keuntungan yang seimbang bagi masing-masing negara yang terlibat.

Tampaknya keseimbangan perolehan keuntungan di antara masing-masing negara tersebut masih harus dilihat kembali, terutama antara Indonesia dengan Singapura yang banyak menanamkan investasinya di Batam-Bintan. Dari data ekspor-impor tahun 1990-an yang ditunjukkan Otorita Batam, misalnya, terlihat bahwa neraca ekspor-impor Batam masih negatif. Sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia, sering mengajukan kritiknya terhadap masalah ini. Sritua Arif (2006), di samping menyatakan

secara absolut neraca ekspor-impor Batam selalu negatif, menegaskan bahwa pengembangan suatu wilayah yang diintegrasikan dengan negara lain, dimana pihak asing berperan sebagai aktor utama dalam proses produksi hanya akan menimbulkan proses penghisapan surplus ekonomi untuk kepentingan asing tersebut, yang dalam konteks Sijori ini adalah Singapura, sebagai negara yang paling diuntungkan secara ekonomi.

Sritua Arif (2006) juga mengakui bahwa kerjasama Sijori dalam bentuknya yang sekarang, yakni pengembangan industri tertentu dengan tujuan ekspor, akan meningkatkan “nilai tambah”, sebagaimana yang sering dikemukakan beberapa pejabat Indonesia. Akan tetapi, menurutnya sebagian besar dari nilai tambah itu justru mengalir ke luar negeri; pihak asing yang mengendalikan proses produksi mendominasi penguasaan nilai tambah. Nilai tambah yang tersisa atau tertinggal di dalam negeri hanya sebagian kecil, berupa upah murah tenaga kerja Indonesia dan pembayaran lokal lainnya. Jika nilai tambah yang diperoleh Indonesia itu dikaitkan dengan kenyataan bahwa di pulau Batam hampir seluruh keperluan rumah tangga diimpor dari Singapura, maka sebenarnya perolehan nilai tambah bagi Indonesia tentu semakin mengecil, dan efek penggandanya akan secara permanen dinikmati oleh Singapura. Pendapatan rumah tangga yang terbentuk di Batam akhirnya menjadi komponen permintaan efektif di Singapura, bukan di Indonesia.

Selain semakin melebarkan kesenjangan antara Indonesia dan Singapura yang memang secara ekonomi sudah senjang, keunggulan komparatif tampaknya juga berpengaruh besar terhadap pelibatan tenaga kerja lokal. Hal ini karena dalam kenyataannya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sama sekali tidak mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada pada mereka. Apa yang terjadi kemudian adalah proses marjinalisasi penduduk setempat sebagai pendukung kebudayaan Melayu oleh para pendatang yang relatif memiliki kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Orang Melayu, sebagai penduduk yang paling lama mendiami Batam-Bintan dan pulau-pulau sekitarnya di pinggir Selat Melaka, tampaknya telah ditakdirkan menjadi saksi sejarah dari berbagai perubahan besar yang senantiasa melanda wilayah itu. Dalam pertemuan berbagai kepentingan yang mengambil tempat di daerah itu, tampaknya posisi penduduk setempat tetap selalu berada di pinggir sebagai penonton. Pada masa Orde Baru, tatkala secara sistematis dipertemukan berbagai kepentingan politik dan ekonomi dengan nama kerjasama Sijori, nasib sejarah penduduk setempat di Kepulauan Riau ini kembali terulang.

Akibat proses industrilisasi yang berjalan secara tidak seimbang antara infrastruktur dengan suprastrukturnya, telah melahirkan kondisi sosial-budaya yang masih memiliki orientasi kebudayaan “tradisional”.

Secara sosial, penduduk setempat memiliki pendidikan yang rendah, *unskill*, sehingga kurang memiliki akses di dalam proses industrialisasi yang sedang berlangsung. Bahkan mereka cenderung tersisih dan secara sistematis mengalami proses marjinalisasi. Di lain pihak, terdapat suatu golongan yang memiliki orientasi budaya “modern” yang secara sosial mereka memiliki pendidikan tinggi, profesional sehingga relatif memiliki kemampuan adaptatif terhadap tuntutan nilai-nilai yang inheren dalam industrialisasi.

Sebagai konsekuensi dari proses industrialisasi adalah terjadi perbenturan antara nilai lama (tradisional) dengan nilai baru (modern), yang tidak saja cenderung membawa pada masa “transisi” berupa erosi nilai lama tetapi juga melahirkan situasi yang antagonistik. Kedua situasi inilah yang sedang melanda penduduk setempat. Salah satu bentuk transformasi nilai adalah akibat semakin bervariasinya pekerjaan yang ditawarkan serta semakin menghilangnya pekerjaan sebagai nelayan, sehingga kedudukan *toke* (saudagar / hasil laut dan hasil bumi) yang dulu banyak diisi tetua adat kini telah kehilangan fungsi. Kenyataan ini tidak hanya memiliki dampak ekonomis bagi para pemimpin tradisional, tetapi secara kultural juga cenderung kehilangan peran. Sistem pelapisan sosial yang baru bukan sekedar melenyapkan pola “*patron-client*”, lebih dari itu tetua adat yang semula sebagai panutan dan simbol status dengan peran kulturalnya telah terpinggirkan. Selain itu dengan hilangnya pekerjaan lama mereka (tetua adat) harus bekerja sebagai buruh, yang dalam sistem sosial baru “dianggap” tidak memiliki status sosial yang tinggi. Akibatnya, masyarakat setempat semakin kehilangan orientasi kepemimpinan, sementara para pemimpin baru seperti RT dan RW dianggap tidak mampu menggantikan peran pemimpin lama.

### **Masyarakat Kepulauan Riau di Era Globalisasi**

Pada mulanya pengembangan kawasan industri Pulau Batam dan Bintan Utara diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagaimana “*teori balon*” yang dikemukakan B.J. Habibie (dalam S.M. Nasution 2001) bahwa daerah di sekitar Batam suatu ketika akan menjadi balon-balon kecil yang merupakan limpahan dari balon besarnya yaitu Singapura. Akan tetapi, teori tersebut saat ini masih sekedar impian masyarakat yang mendiami kawasan Kepulauan Riau, khususnya Kepulauan Lingga dan Singkep sampai ke Kepulauan Tujuh (Natuna).

Penduduk Kepulauan Lingga yang berjumlah 23.205 jiwa hingga kini tampaknya belum menikmati kemakmuran yang merupakan dampak dari pengembangan kawasan industri Batam-Bintan. Bahkan secara fisik,

wilayah Kepulauan Lingga dan sekitarnya justru terbengkalai dan tidak ada kepastian dalam pemanfaatan tata ruang. Masyarakat selalu menerima isu atau kabar burung bahwa Kepulauan Lingga oleh konglomerat Jakarta akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, tetapi kabar itu hilang. Lalu muncul berita baru bahwa pulau itu akan dijadikan kawasan untuk produk daging dan sayur mayur, namun tidak lama kemudian berita itu juga hilang begitu saja. Isu demi isu muncul secara bergantian tanpa ada tanda-tanda realisasinya.

Saat ini secara administrasi pemerintahan, Kepulauan Lingga sudah menjadi daerah kabupaten, tetapi masih tertinggal dan masih termasuk daerah terisolir. Walaupun alamnya potensial, yakni tanahnya relatif subur, ada air dari gunung Daik, iklimnya sedang, dalam kenyataannya sembilan bahan pokok masih bergantung dari Tanjungpinang dan Sumatera. Bagi penduduk yang tidak punya kegiatan, untuk menyambung hidupnya mereka menebang kayu di hutan lalu dijual. Demikian pula penduduk yang mengolah sagu, dalam kehidupan sehari-harinya juga tidak mencukupi.

Begitu pula Pulau Singkep yang tadinya menjadi tumpuan masyarakat pindahan dari Pulau Lingga, kini mengalami stagnasi dan perekonomiannya menjadi runtuh. Setelah ditinggal “perusahaan timah”, sebagian kegiatan masyarakat berorientasi ke kawasan industri Batam dan Bintan. Penduduk Pulau Singkep yang berjumlah 37.686 jiwa, hingga kini tahun 2000-an rata-rata berkurang 1.000 jiwa tiap tahunnya karena pindah ke Pulau Batam.

Mereka yang pindah ke Pulau Batam adalah penduduk yang pernah bekerja pada perusahaan timah, sehingga dapat dianggap memiliki keterampilan sebagai buruh industri. Ternyata setelah sampai di Pulau Batam sebagian menganggur, sebagian menjadi buruh bangunan (tukang kayu dan tukang batu), dan sebagian lagi dapat masuk sebagai karyawan industri. Bagi yang menjadi buruh bangunan biasanya bersaing dengan para buruh yang datang dari Pulau Jawa, dan yang bekerja menjadi karyawan industri tampaknya oleh perusahaan yang bersangkutan dianggap belum mampu berkompetisi dengan karyawan lainnya.

Ironinya bahwa mantan buruh perusahaan timah yang pada mulanya diandalkan sebagai tenaga kerja terampil putra Melayu Kepulauan Riau, dalam kenyataannya belum mendapat kesempatan yang sederajat dengan buruh lainnya pada saat berkompetisi di Batam. Keadaan seperti ini tampaknya akan berkelanjutan, apabila tidak ada kebijakan politik dari pihak industri untuk memberi kesempatan putra putri Melayu. Pertanyaan

yang selalu muncul adalah sejauh mana dampak pengembangan Batam dan Bintan bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau sekitarnya?

Walaupun sudah di era Otonomi Daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa hingga kini pembangunan daerah Kepulauan Riau masih merupakan “pembangunan pemerintah pusat di daerah” yang menginkorporasikan daerah ini ke dalam sistem kapitalisme internasional. Dampaknya adalah terabaikannya kepentingan-kepentingan masyarakat daerah bersangkutan. Model pembangunan seperti ini cenderung kurang peduli terhadap korban yang harus dibayar oleh mayoritas penduduk di daerah itu.

Selain itu, hingga kini sistem politik regional (di kawasan Sijori) tampaknya belum pernah memihak kepada penduduk Melayu. Begitu pula sistem politik nasional sejak pasca kemerdekaan R.I. masih perlu dipertanyakan sejauh mana pemihakannya terhadap alam Melayu. Dalam konteks inilah peminggiran masyarakat Melayu mudah dilegalisir dari masa ke masa. Akibatnya kebudayaan Melayu semakin suram dan masyarakat Melayu menjadi rapuh. Juga “Kepribadian Melayu” semakin menjadi perbincangan sebagaimana cerita rakyat yang dituturkan.

Permasalahan seperti itu tampaknya tidak akan selesai dibahas dalam konteks ini. Sedangkan permasalahan sederhana yang dihadapi masyarakat Kepulauan Riau yang “quo-vadis” saat ini, yaitu bagaimana cara mempertahankan diri, merupakan permasalahan dasar yang tidak ditemukan jawabannya. Memang dalam mitologi lama selalu diingatkan bahwa “tak Melayu hilang di bumi”, tetapi apakah mungkin era globalisasi yang ganas ini masyarakat Melayu sebagaimana yang terekspresikan dalam Panggung Bangsawan, bisa mempertahankan diri.

### **Konfrontasi Budaya di Alam Melayu**

Pada pertengahan dasawarsa 1960-an Indonesia-Malaysia pernah melakukan konflik yang cukup menegangkan. Salah satu penyebabnya adalah keinginan Malaysia untuk menggabungkan wilayah Brunei, Sabah, dan Serawak dalam Persekutuan Tanah Melayu. Keinginan itu ditolak oleh Presiden Indonesia, Soekarno, karena Malaysia dianggap sebagai “boneka” Inggris, sehingga konfrontasi tidak bisa dihindarkan. Selain itu, keinginan Malaysia tersebut tanpa mengajak berunding pihak Indonesia, seolah Indonesia ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi, yang menyakitkan bagi Indonesia adalah ketika Indonesia sedang berjuang mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia, pihak Malaysia tidak mendukung. Sejak itu jargon politik yang dikeluarkan Soekarno adalah “*Ganyang Malaysia*”, dan peristiwa tersebut terkenal dengan sebutan Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Konfrontasi ini berakhir ketika terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia pada awal tahun 1966. Pada saat itu Jenderal Soeharto dapat mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno. Pada tanggal 28 Mei 1966 diadakan sebuah konferensi di Bangkok, bahwa Indonesia-Malaysia menyetujui penyelesaian konflik. Kemudian diadakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966. Pada masa ini disebut era Orde Baru, hubungan kedua negara bertetangga ini cukup baik, sehingga banyak kesepakatan-kesepakatan kerjasama bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Setelah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, banyak hal yang mengganggu kembali hubungan Indonesia-Malaysia. Persoalan-persoalan yang belum tuntas pada masa Orde Baru, masih menimbulkan ketegangan, antara lain diawali dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 oleh keputusan Mahkamah Internasional. Belum sembuh sengketa Sipadan dan Ligitan, Malaysia kembali menyulut persoalan baru dengan mengklaim blok Ambalat sebagai wilayah teritorial mereka pada tahun 2005. Pada saat itu Malaysia mempersilahkan perusahaan minyak Amerika, Shell untuk melakukan eksplorasi di laut Sulawesi. Malaysia mengklaim blok Ambalat yang berada di perairan tersebut adalah miliknya. Padahal, berdasarkan deklarasi Juanda 1957, wilayah laut tersebut milik Indonesia. Deklarasi Juanda sendiri pada tahun 1959 telah diadopsi oleh PBB ke dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Dengan demikian, PBB pun mengakui kepemilikan Indonesia atas wilayah tersebut.

Dalam menghadapi kasus Ambalat, Pemerintah RI mengerahkan tujuh kapal perangnya ke perairan Karang Unarang dekat laut Sulawesi. Rakyat sekitarnya juga meminta pemerintah RI untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas pemerintah Malaysia tersebut. Jargon politik “*Ganyang Malaysia*” kembali populer, sehingga demonstrasi menentang Malaysia digelar dimana-mana. Apabila tidak segera dicarikan solusi yang baik di antara kedua negara mungkin konfrontasi seperti pada tahun 1960-an kembali terulang.

Melihat kenyataan demikian ada beberapa hal penting yang harus disadari, yakni kesamaan serumpun dan agama ternyata tidak menjamin perdamaian. Begitu pula dewasa ini nasionalisme masing-masing negara justru dapat menciptakan perpecahan. Jadi dua negara yang sama-sama memiliki nasionalisme bisa juga menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Oleh karena itu paham serumpun, seagama, dan nasionalisme perlu dievaluasi, supaya kebaikan bukan hanya tercipta di dalam negeri melainkan juga dalam hubungan dengan negara tetangga. Pada sisi lain, sejarah mencatat dari segi kebudayaan dan penggunaan bahasa, istilah

“Nusantara” mencakup daerah kepulauan Asia Tenggara atau daerah di mana budaya dan bahasa Austronesia dilestarikan. Dari segi ini, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan mungkin pula Vietnam serta Madagaskar termasuk daerah Nusantara yang dulu bersatu.

Konflik masalah sosial, ekonomi, dan politik itu juga berlanjut dan beralih pada masalah kebudayaan. Dewasa ini khazanah budaya yang diklaim milik Malaysia, antara lain Tari Piring, sebuah tari dari Minangkabau yang menyebar ke wilayah Sumatera. Biasanya tarian ini dipersembahkan dalam acara perkawinan, untuk menyambut tamu, atau menyambut pesta “*Nagari*” di Sumatra Barat. Tarian ini mempunyai berbagai gerakan yang disebut juga ayun atau buai. Selain itu terdapat sepasang cincin yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai perhiasan dan sebagai alat musik karena mengeluarkan bunyi apabila dilagakan kepada piring dengan mengikuti rentak gong.

Tari Kuda Kepang (*Jaran Kepang* Jawa) juga diklaim milik Malaysia. Kuda Kepang menampakkan pengaruh Jawa dan Islam. Pengaruh Jawa terlihat pada pakaian penari-penari, sedangkan pengaruh Islam tercermin dalam cerita dan tariannya. Tarian ini menggambarkan peristiwa peperangan pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan penuh kegagahan memperjuangkan Islam. Selain itu Kuda Kepang diciptakan di Pulau Jawa oleh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam.

Klaim kepemilikan khazanah budaya tersebut yang cukup aneh adalah lagu Rasa Sayange. Mungkin sudah lama orang Indonesia mengetahui bahwa Malaysia mengambil lagu Rasa Sayange sebagai milik Malaysia, bahkan digunakan sebagai dasar lagu (*jingle*) promosi pariwisata mereka. Sejak diklaimnya lagu Rasa Sayange, muncul berbagai reaksi oleh warga negara Indonesia baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagian besar sangat mengutuk tindakan Malaysia yang mengklaim lagu ini dan sebagian tetap tidak peduli atau tidak serius. Padahal seharusnya bangsa Indonesia mengerti bahwa Rasa Sayange adalah bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Sukar dibayangkan apabila bangsa Indonesia mengabaikan khazanah kebudayaan Indonesia menjadi milik bangsa lain. Sangat jelas kebudayaan merupakan ciri khas kekayaan bangsa Indonesia, ketika satu persatu hilang, sama saja Indonesia kehilangan jati diri bangsa.

Ketika pemerintah Malaysia menetapkan pariwisata sebagai andalan negerinya, maka dipersiapkan semua infrastruktur terkait. Dimulai dari “*Visit Malaysia 2007*” dan “*Malaysia Truly Asia*” yang digaungkan ke seluruh dunia, dilanjutkan dengan pembenahan infrastruktur bandara, tata kota dan diakhiri dengan menambah aset pariwisata yang salah satunya

adalah kekayaan budaya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pengklaiman budaya Indonesia memang bertujuan untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara pariwisata utama dunia. Ketertarikan masyarakat dunia terhadap warisan budaya Asia Tenggara sampai saat ini masih sangat tinggi. Malaysia telah mengadakan semacam festival internasional yang mempertunjukkan tari-tarian, angklung, wayang dan lain-lain. Malaysia ingin mengatakan pada dunia: “Kalau anda ingin melihat budaya Asia, tak usah kemana-mana. Semua ada di Malaysia”.

Sampai di sini sangat jelas bahwa masyarakat Indonesia mengadakan demonstrasi atau berteriak “*Ganyang Malaysia*” sama sekali bukan solusi. Satu kelebihan mereka yang harus diakui adalah pemerintah Malaysia memiliki visi kuat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Mereka juga bisa memanfaatkan setiap jengkal tanah dan kekayaan yang dimiliki semaksimal mungkin. Dengan kata lain konflik kepemilikan budaya Indonesia-Malaysia dewasa ini, bisa dijadikan sebagai kesadaran baru untuk mensyukuri kekayaan Indonesia supaya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Belum reda kasus lagu Rasa Sayange, kini Malaysia mengklaim reog sebagai miliknya. Kasus itu muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. Gambar “*dadak merak reog*” terpampang di website itu dan di depannya terdapat tulisan “Malaysia”. Selain itu, di Malaysia banyak cerita yang ditampilkan dalam tarian barongan, mirip dengan cerita pada tarian reog Ponorogo. Bila benar Malaysia gencar mempromosikan diri sebagai *Truly Asia*, mengklaim reog Ponorogo sebagai bagian dari kekayaan budayanya, tentu hal itu akan membuat seniman reog di Ponorogo dan masyarakat Indonesia pada umumnya terperangah, karena Reog adalah kesenian tradisional Ponorogo.

Kesenian reog memiliki pijakan historis yang sangat panjang dan kuat di Ponorogo yang dibuktikan dengan banyaknya tokoh seni tersebut. Di sana terdapat banyak tokoh reog, seperti warok, gemblak, dan jathil. Fenomena ini sudah menjadi bukti empiris bahwa reog adalah seni khas Ponorogo. Jadi, jika Malaysia mengklaim reog berasal dari budayanya adalah mustahil.

Meski serumpun, bangsa Indonesia dan Malaysia memang tidak selalu mesra dalam membangun hubungan diplomatik. Ketidak-harmonisan itu juga dimulai sejak zaman Orde Lama, Presiden Soekarno dalam komandonya ingin mengganyang Malaysia. Pada zaman Orde Baru pun, Malaysia tidak berani melecehkan bangsa Indonesia, karena rakyatnya sering mendengar cerita bahwa pada masa lalu banyak mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Namun pada era Reformasi sejarah berbalik, ketika

bangsa Indonesia dilanda krisis moneter dan tidak segera ada perbaikan, mulailah Malaysia berani “usil”. Dari segi ekonomi dan pendidikan, Malaysia makin jauh melesat meninggalkan bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia disibukkan dengan konflik antar elite.

Sudah waktunya masyarakat boleh mengetahui apa saja kebijakan pemerintah terhadap kekayaan budaya Indonesia. Ketidaktahuan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah bisa saja berdampak pada "pengambilalihan" penyelesaian ini, dari pemerintah oleh masyarakat. Akibatnya, konflik horizontal mudah terjadi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia, dan konflik semacam itu sukar dikendalikan.

Pada masa lalu (sekitar 1932) para tokoh, intelektual, dan pejuang dari Malaysia mencanangkan satu negara bernama “Melayu Raya”. Dalam tahun yang sama, pemuda Muhammad Yamin di Jakarta juga mengemukakan obsesinya tentang “Melayu Raya” atau “Indonesia Raya”. Gagasan itu terungkap lagi ketika Malaysia-Philipina-Indonesia berencana mendirikan Maphilindo, akronim dari Malaysia-Philipina-Indonesia di Manila pada 1963. Para presiden dari ketiga negara tersebut mengumumkan Deklarasi Manila yang menggabungkan negara mereka ke dalam Maphilindo. Dalam pidato penutupan, Presiden Filipina Macapagal mengajak hadirin untuk mengenang kembali mimpi para nasionalis Filipina mulai Jose Rizal, Presiden Manuel Quezon, Wenceslao Vinzons, sampai Presiden Elpidio Quirino untuk menyatukan bangsa Melayu.

Maphilindo tidak terwujud, karena terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, setelah Soekarno mengumandangkan "Dwikora" yang pada pokoknya menyatakan bahwa Malaysia adalah proyek imperialis oleh karena itu harus diganyang. Dampak konfrontasi yang dicanangkan Soekarno itu ialah memudarnya cita-cita Melayu Raya, bahkan sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kambodia, dan Madagaskar yang mengungkap sentimen Melayu tersebut. Masing-masing sibuk dengan persoalan negara sendiri dan masyarakatnya. Khusus bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, boleh dikatakan nyaris melupakan ke-Melayu-an karena sedang berproses menjadi Indonesia, meskipun mayoritas secara kultural rakyat Indonesia tergolong ras Melayu-Polnesia. Hanya Papua yang mayoritas ras Melanesia, sedangkan Maluku dan pulau-pulau di Nusa Tenggara masih banyak yang Melayu kendati sudah meninggalkan ke-Melayu-annya.

Malaysia terbentuk sebagai negara pada tahun 1963. Sebelumnya, pada tahun 1957 bernama Persekutuan Negara Melayu, sehingga negeri tersebut menganggap dirinya sebagai pewaris sah yang memiliki kebudayaan Melayu. Padahal abad ke-7 Masehi, di Jambi telah berdiri

Kerajaan Melayu yang kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya, namun bangkit kembali setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-12. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi inti bahasa Indonesia dan bahasa resmi Malaysia dewasa ini sesungguhnya bersumber dari daerah Riau Lingga (Indonesia).

Pemimpin dan rakyat Malaysia bukan tidak memahami sejarah. Proses akulturisasi di antara bangsa-bangsa Melayu telah melahirkan produk budaya mulai lagu, tari, kerajinan tangan, makanan, adat-istiadat, dan sebagainya sama atau mirip di kawasan Melayu Raya, mulai Jawa sampai Madagaskar. Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak pernah mengklaim produk budaya tersebut. Indonesia tidak mungkin mengklaim barongsai menjadi kesenian Indonesia, zapin menjadi tari Indonesia, kendati sudah ratusan tahun hidup di Indonesia. Banyak penyanyi keturunan Maluku yang tersohor di Belanda, tetapi masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkannya dan mengklaimnya.

Selanjutnya biarlah batik, reog, kuda kepang, tari piring, serimpi, dan lain-lain itu menjadi milik umat manusia yang pernah atau tetap disebut "Melayu". Juga wayang kulit dan wayang orang yang sudah berkembang di Malaysia, terutama di Johor Baru, biarlah menjadi milik umat manusia. Jika Malaysia ingin menjadi pewaris Melayu, maka yang justru diwarisi dan dilestarikan adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di berbagai negeri, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Madagaskar, dan Hawaii.

Baik atau buruknya hubungan Indonesia-Malaysia merupakan faktor penentu pada keamanan regional Asia Tenggara. Sejarah konfrontasi di masa lalu dan rujuknya kedua negara serta pembentukan ASEAN dapat dilihat dari konteks pengaruh hubungan kedua negara tersebut. Oleh karena itu, bicara mengenai peningkatan hubungan kedua negara harus selalu dikaitkan dalam konteks ASEAN. Di sini dapat dikatakan bahwa dalam masa reformasi ini, Indonesia jelas telah kalah jauh dari Malaysia dalam mengejar ketertinggalan, belum lagi bila diuraikan keberhasilan Malaysia mengatasi masa krisis yang sama-sama dihadapi oleh kedua negara.

## **Penutup**

Dalam konteks pembangunan masyarakat Melayu dan promosi pariwisata yang sangat bersemangat inilah, Malaysia menjual segala produk budaya yang eksis di negerinya. Ternyata, dalam promosi tersebut menyangkut antara lain lagu *Rasa Sayange* dan *Reog* yang disebut *Barongan* yang dimainkan orang Jawa di salah satu negara bagian yang dihuni oleh imigran keturunan Ponorogo. Pariwisata Indonesia seharusnya lebih berbenah diri dalam mengejar ketertinggalan dan melakukan

kampanye yang gencar seperti halnya Malaysia dengan menjual sebanyak mungkin berbagai unsur seni budaya yang eksis dan eksotis. Dalam konteks kerukunan dan perdamaian ASEAN, kurang tepat bila pendekatan bilateral didasarkan pada isu serumpun dan agama. Pendekatan seharusnya berdasarkan politik kebudayaan yang rasional dan strategis dengan mempertimbangkan faktor perekat dan pemisahannya.

Pada masa Orde Baru politik kebudayaan yang berlaku, khususnya di negara terdekat adalah seperti dalam kesepakatan *growth triangle* Sijori. Akan tetapi dalam realisasinya lebih ke politik ekonomi, Indonesia mengadakan hubungan sendiri dengan Malaysia, dan Indonesia mengadakan hubungan sendiri dengan Singapura. Jadi yang benar-benar segitiga pertumbuhan yang mencakup tiga negara (Singapura, Malaysia, Indonesia) belum terwujud. Dalam melaksanakan program keunggulan komparatif Indonesia dengan Singapura, dapat berupa “fisik”, seperti sosial, ekonomi, dan teknologi. Sedangkan keunggulan komparatif Indonesia dengan Malaysia, dapat berupa “non-fisik”, seperti mitologi, nilai-nilai, alkisah, dan sebagainya. Bila keunggulan komparatif ini terwujud, paling kurang dapat menjadi perekat antar negara bertetangga.

Faktor pemisah yang harus diperhatikan adalah wujud konfrontasi yang pernah terjadi pada masa lalu perlu dicermati secara seksama. Pada tahun 1960-an realitasnya konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konfrontasi politik. Dewasa ini sebagaimana diuraikan di depan yang terjadi adalah konfrontasi kebudayaan. Oleh karena itu, pihak Indonesia sekarang ini sangat perlu mengantisipasi menyebarnya industri budaya akibat globalisasi. Dalam menghadapi hal ini, bangsa Indonesia harus sadar bahwa globalisasi tidak mengenal batas negara, rumpun, agama, atau ideologi. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, bangsa Indonesia seharusnya bukan mewariskan khazanah budaya, melainkan menginteraksikan khazanah budaya tersebut kepada generasi penerus bangsa. Kalau diwariskan belum tentu generasi penerus dapat menerimanya, tetapi bila diinteraksikan maka generasi penerus akan bertanggungjawab secara berkesinambungan.

### **Daftar Pustaka**

- Alatas, Syed Hussein, 1989. *Mitos Pribumi Malas*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Arief, Sritua, 2006. *Negeri Terjajah: Menyingkap Ilusi Kemerrdekaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Budisantoso, dkk, 1986. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Pemda Tk. I Riau.

- Bujang, Rahmah, 1975. *Sejarah perkembangan Drama bangsawan di Tanah Melayu dan Singapura*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Galba, Sindu, dkk., 2001. *Sejarah Kerajaan Riau Lingga*. Tanjungpinang: Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Giddens, Anthony, 2003. *Masyarakat Post-Tradisional*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kadir, Wan Abdul, 1988. *Budaya Populer Dalam Masyarakat Melayu Bandaran*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Lapian, Adrian, 1994. Some Explorations in the History of the Maritime World of Southeast Asia (Orasi Ilmiah). IAHA. Sophia University Tokyo. September.
- Lee Tsao Yuan (ed.), 1991. *Growth Triangle, The Johor – Singapore – Riau Experience*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Nasution, Surya Makmur, 2001. *Batam: Jangan Sampai Arang Habis Besi Binasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Owens, Edgar dan Robert Shaw, 1983. *Pembangunan Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1989. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yusuf, Yusmar, 2002. *Saujana Senja: Detak Batam Melayu Bangkit*. Batam: Komunitas Angin Taung.

